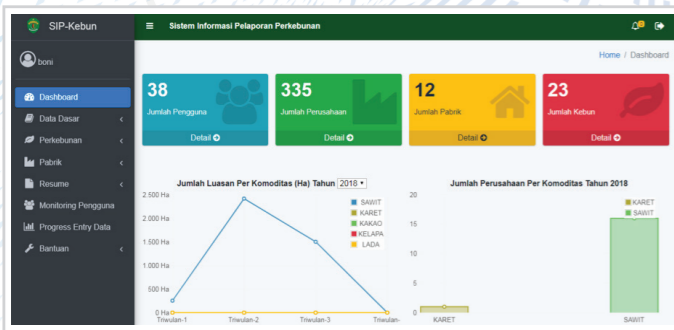




- a. WebGIS Perkebunan Kalimantan Timur (Sistem Informasi Geospasial Dinas Perkebunan - Kalimantan Timur)
Payung Hukum : Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Tim Pengembangan Database dan Sistem Informasi Geospasial Perkebunan Berbasis Web Tahun 2017.

Manfaat program :

1. Tersedianya data spasial terkini dengan gambar citra satelit resolusi tinggi.
2. Menjadi bahan penyusunan kebijakan pemanfaatan lahan perkebunan.
3. Membantu legalitas lahan perkebunan rakyat untuk memperoleh sertifikasi.
4. Membantu analisa kawasan bernilai konservasi tinggi pada area perkebunan.
5. Membantu sistem pengendalian pencegahan kebakaran lahan perkebunan.
6. Membantu proses penanganan konflik-konflik berbasis lahan .



- b. Sistem Informasi Pelaporan Kebun (SIP) Kebun (SIP-Kebun)

Manfaat program:

1. Menjadi jembatan antara pemerintah dan perusahaan dalam berkomunikasi melalui laporan kinerja perusahaan dan memberi umpan balik dari dinas perkebunan.
2. Menyediakan informasi legalitas perusahaan.
3. kegiatan perkebunan (pembukaan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan,

pengendalian hama),

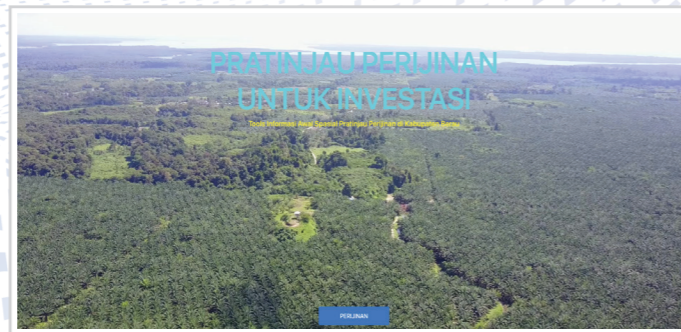
4. Mengetahui kondisi ketenagakerjaan, kondisi sarana prasarana perkebunan, operasional pabrik pengolahan minyak sawit.
5. Mengetahui jumlah penanganan konflik di sektor perkebunan.



- c. WebGIS Perkebunan Kabupaten Berau

Manfaat program:

1. Dapat mengetahui masa berlaku dan daluarsa dari izin perkebunan
2. Mengetahui kondisi titik-titik kebakaran lahan/hotspot
3. Melakukan inventarisasi dan validasi data keanekaragaman hayati.



- d. Pratinjau Perizinan untuk Berinvestasi di Kabupaten Berau (<http://pratinjau.beraukab.go.id>)
Payung hukum: Surat Keputusan Bupati Berau No. 213 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Aplikasi Pratinjau Usulan Perizinan Berbasis Lahan

Manfaat Program :

1. Merupakan tinjauan awal terhadap permohonan izin berbasis lahan yang menggunakan data geospasial.
2. Pengguna bisa memperoleh data: pola ruang, status kawasan hutan, tumpang tindih izin, tutupan lahan, kelas kesesuaian lahan, dan Peta Indikatif Area dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT).



Transformasi Sistem Informasi Perkebunan untuk Indonesia Lestari

Sektor perkebunan berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Pada 2021, kontribusi sektor perkebunan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 3,94 persen. Adapun komoditas perkebunan yang menjadi andalan nasional adalah kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, dan kakao.

Kelapa sawit menjadi komoditas terbesar yang dikembangkan dalam sektor perkebunan di Indonesia. Saat ini area perkebunan kelapa sawit nasional mencapai 15,08 juta hektare, menjadi terluas dibanding komoditas perkebunan unggulan lainnya. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan perkebunan kelapa sawit lantaran memiliki dampak ekonomi, sosial budaya dan ekologi terbesar di antara komoditas perkebunan lainnya. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2019-2024 menyebutkan perlunya peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan sawit sebagai energi baru dan terbarukan, dan meningkatkan diplomasi dalam mencapai perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Menjadi provinsi yang mencakup sembilan persen dari total luasan perkebunan kelapa sawit nasional, atau sekitar 1,37 juta hektare, Kalimantan Timur telah melakukan serangkaian strategi untuk mendukung perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Hal ini tak lepas dari program Kaltim Hijau yang telah dideklarasikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada 2010. Program ini bertujuan mendorong penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, peningkatan indeks lingkungan hidup, serta pertumbuhan ekonomi dengan prinsip berkelanjutan. Salah satu upaya transformasi menuju ekonomi hijau yang ditempuh adalah lewat pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Kelapa sawit merupakan komoditas utama perkebunan di Kalimantan Timur. Luas area tanam mencapai 1,37 juta

hektare atau sekitar 88 persen dari total wilayah perkebunan di provinsi itu. Adapun empat komoditas unggulan perkebunan lainnya adalah kelapa dalam, karet, kakao, dan lada. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kontribusi sektor perkebunan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Timur menunjukkan tren meningkat. Pada 2021 sektor perkebunan memberikan kontribusi sebanyak 4,97 persen dari total PDRB, meningkat dari 2016 yang sebesar 4,43 persen.

Peningkatan kontribusi terhadap PDRB Kalimantan Timur itu juga berkorelasi dengan penambahan luas perkebunan kelapa sawit yang pada 2021 mencapai 1,37 hektare, bertambah sekitar 210 ribu hektare sejak 2016. Perkebunan kelapa sawit juga memberikan lapangan kerja untuk 218 ribu jiwa di Kalimantan Timur.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, juga berupaya mempertahankan kawasan hutannya sebagai komitmen dalam program Kaltim Hijau. Sebagai kabupaten terbesar ketiga di Kalimantan Timur, seluas 2,55 juta hektare atau 75 persen dari total area Berau masih tertutup hutan dengan kategori primer dan sekunder. Berau juga memiliki Program Karbon Hutan Berau (PKHB) yang merupakan strategi pemerintah daerah mengurangi emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan. Program ini pun menjadi panduan Pemerintah Kabupaten Berau membuat kebijakan pembangunan yang selaras dengan pengelolaan sumber daya alam lestari.

Meski demikian, Berau masih mengalami deforestasi berupa konversi hutan alam. Dalam Rencana Strategis PKHB, 70 persen deforestasi di Berau dipicu konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Menurut Badan Pusat Statistik, luas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Berau mencapai 257 ribu hektare pada 2021. Pada 2019, menurut data Dinas Perkebunan Berau, luas perkebunan kelapa sawit masih 135 ribu hektare.

Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta Pemerintah Kabupaten Berau dalam pembangunan hijau menjadi peluang yang baik untuk mendukung pengelolaan perkebunan sawit yang berkelanjutan. Pemerintah daerah itu bekerja sama

dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), dan Climate Policy Initiative (CPI), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan para mitra di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten mengembangkan program pembangunan perkebunan kelapa sawit rendah emisi.

Inisiatif ini diharapkan dapat mendukung pencapaian prioritas sosial, ekonomi, dan lingkungan Pemerintah Indonesia terhadap Inisiatif Pengelolaan Perkebunan Sawit Berkelanjutan. Program ini juga bertujuan memastikan bahwa sektor sawit dapat berkembang namun tetap menghormati serta melindungi hak-hak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari masyarakat lokal.

Peran Sistem Data dan Informasi dalam Perkebunan Sawit Berkelanjutan

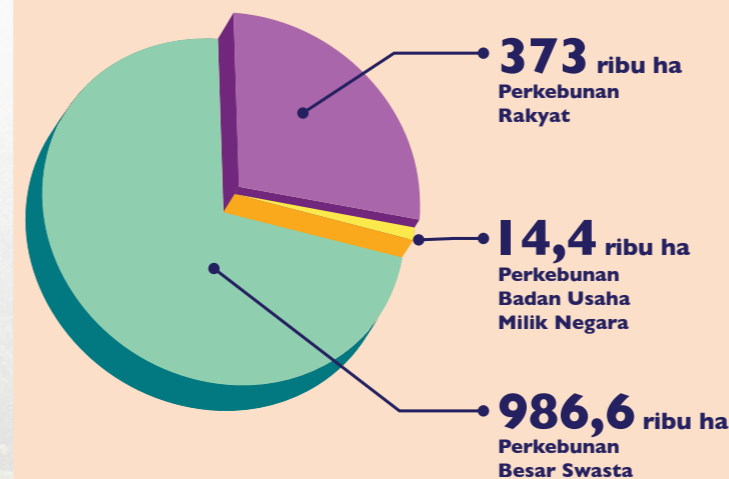
Percepatan implementasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bisa dicapai dengan berbagai dukungan. Salah satunya adalah pengembangan sistem data dan informasi. RAN (Rencana Aksi Nasional) Perkebunan Sawit Berkelanjutan pun mengamanatkan untuk menguatkan data, koordinasi, dan infrastruktur. Salah satu tugas khusus yang diberikan kepada Menteri Pertanian adalah menguatkan data dasar perkebunan kelapa sawit melalui koordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan Kepala Badan Informasi Geospasial.

Penguatan sistem data dan informasi perkebunan itu juga dapat dimanfaatkan untuk membantu menyelesaikan status usaha lahan yang terindikasi dalam kawasan hutan dan ekosistem gambut. Pemanfaatan lahan kritis dalam perkebunan kelapa sawit juga bisa menjadi upaya menurunkan emisi gas rumah kaca. Kegunaan lain sistem data dan informasi untuk penanganan sengketa lahan perkebunan di kawasan area penggunaan lain (APL).

Kendala pada sistem data dan informasi berdampak besar pada sistem pengelolaan perkebunan di

Kalimantan Timur. Data geospasial yang belum dikelola dengan baik menyebabkan luas dan posisi kebun tidak tepat. Kondisi ini bisa memicu konflik lahan. Sistem pengumpulan data yang lambat dan tidak terstandard juga dapat menjadi kendala. Tantangan lainnya adalah tingkat kepatuhan perusahaan pengelola perkebunan dalam pelaporan masih rendah. Padahal kewajiban melaporkan perkembangan usaha, setidaknya sekali dalam setahun kepada pemberi izin, sudah tercantum di dalam Undang-Undang Perkebunan.

Komposisi Kepemilikan Perkebunan Kelapa Sawit Kalimantan Timur (2021)



Pengembangan Sistem Data dan Informasi Perkebunan

Undang-undang dan regulasi daerah tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan tahun 2018 menyebutkan bahwa pemerintah wajib membangun, mengembangkan, dan menyediakan sistem data dan

informasi perkebunan yang terintegrasi. Sistem data dan informasi itu harus diperbarui secara berkala serta dapat diakses dengan mudah oleh pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengembangkan database dan Sistem Informasi Geospasial (SIG) Perkebunan sejak 2017. Program ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola, tata guna lahan, dan kapasitas pemerintah dalam perencanaan dan pengawasan perkebunan berkelanjutan. Program ini juga menjadi bagian dari kebijakan *One Data, One Map Policy* yang mengintegrasikan data spasial lintas sektor (kehutanan, perkebunan, pertanian, pertambangan) di Kalimantan Timur.

Pengembangan sistem data dan informasi tersebut membantu pengelola perkebunan, baik perorangan maupun korporasi, dalam melaporkan usahanya. Pelaporan data menjadi lebih cepat dan efisien karena tidak lagi membutuhkan tumpukan dokumen seperti ketika dikerjakan dengan sistem konvensional.

Di Kalimantan Timur, hingga 2021 terdapat 342 pemegang Izin Usaha Perkebunan (IUP) di lahan kelola seluas 2,53 juta hektare. Dengan aplikasi sistem data yang terintegrasi, pemerintah daerah juga dapat memantau perkembangan perkebunan di wilayah yang luas dengan efisien dan efektif. Dampak digitalisasi sistem data dan informasi, transparansi pembangunan perkebunan berkelanjutan menjadi lebih baik. Publik pun bisa ikut memantau perkembangan usaha perkebunan di Kalimantan Timur.

Praktik baik ini memiliki potensi besar untuk direplikasi dalam skala yang lebih luas. Dengan demikian, program pembangunan perkebunan yang berkelanjutan juga dapat memiliki dampak lebih besar. Dinas Perkebunan Kalimantan Timur berkolaborasi dengan YKAN, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Timur, Dinas Perkebunan Berau, Badan Penelitian dan Pengembangan Berau, Dinas Kehutanan Berau mengembangkan sistem pengelolaan data dan informasi perkebunan. Aplikasi yang telah dibuat: